

BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif bersifat keuangan dalam kesatuan ekonomi yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber alternatif pengambilan keputusan. Alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan output dan hasil akhir proses akuntansi, dan secara berkala dikomunikasikan kepada pengambil keputusan baik oleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan, seperti: investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat luas.

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari: laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu faktor penting menyajikan suatu informasi yang relevan adalah ketepatanwaktuan (*timeliness*) (Reathani, 2003).

Publikasi laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan keuangan. Tujuan publikasi laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Rani, 2006).

Dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan, ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan terhadap pembuatan keputusan. Ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Ketepatanwaktuan juga merupakan syarat agar informasi dikatakan relevan. Dikatakan relevan jika informasi tersebut tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

Menurut Meyti (2005) dalam Rani (2006) informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan dibutuhkan oleh analisis sekuritas, manajer, pemberi pinjaman, pemasok, karyawan dan bahkan pemerintah. Ada dua alasan mengapa pihak-pihak ini membutuhkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu: (1) Informasi yang ada dalam laporan keuangan memiliki potensi untuk mengurangi ketidakpastian. (2)

Informasi laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dapat berkompetisi dengan sumber informasi lainnya.

Informasi keuangan akan lebih baik bila dapat disajikan dalam laporan keuangan, unsur utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditur, pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Bagi pihak manajemen laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Menurut Suwardjono (2005) dalam Indriasari (2008) bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan dari *cash basis* ke *accrual basis* dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan

audit laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2006) dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (KPPOD) mendukung kebijakan depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah (Winidyaningrum, 2010).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Winidyaningrum (2010). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengubah objek penelitian dan tahun penelitian yaitu di pemerintah daerah yang terdapat di DIY pada tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Sumber daya Manusia dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi** “(studi empiris pada Pemerintah Daerah yang terdapat di DIY)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah :

1. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat dibidang praktik

Manfaat bagi pemerintah daerah dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaporan keuangan daerah dengan

mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan) atau dapat disebut juga kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat